



Bumi Bung Karno
BLITAR
keren

LKjIP

2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan kekuasaanya sehingga dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2024. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar selama tahun 2024 dengan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini adalah berkat kerja keras seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kota Blitar dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan anggaran yang ada.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sekaligus sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang serta bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Blitar, Februari 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar



AGUS SUHERLI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 196808081997031006

IKHTISAR RINGKASAN

Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, sebagai Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan trantibum serta perlindungan masyarakat sub-bidang/urusan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sendiri menjalankan fungsi di antaranya:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat”***.

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar di dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar ditujukan untuk mewujudkan *Misi Keempat* Kota Blitar : **Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan**, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sebagai tindaklanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2024. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam melakukan kinerjanya guna mencapai sasaran strategis selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis/kinerja utama yang didukung berbagai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 4.582.028.306 (Empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah)**, yang penjabarannya tersaji pada tabel alokasi anggaran belanja dan realisasinya di bawah ini:

No.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB- KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	980.761.824	860.799.559	87,77
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	280.451.000	252.601.050	90,07
1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	280.451.000	252.601.050	90,07
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	468.852.324	426.017.260	90,86
1.2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	98.221.800	80.252.450	81,71
1.2.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	138.076.340	119.307.500	86,41
1.2.3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	60.858.800	60.144.500	98,83
1.2.4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	171.695.384	166.312.810	96,87
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	82.108.400	66.568.049	81,07
1.3.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	82.108.400	66.568.049	81,07
1.4	Penataan Sistem Dasar	149.350.100	115.613.200	77,41

	Penanggulangan Bencana			
1.4.1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	149.350.100	115.613.200	77,41
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.601.266.482	3.347.783.721	92,96
2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.651.400	8.191.000	76,90
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.188.000	6.017.500	97,24
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.463.400	2.173.500	48,70
2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.182.483.719	2.114.314.672	96,88
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.179.521.419	2.112.855.172	96,94
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2.962.300	1.459.500	49,27
2.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.750.700	148.745.200	89,20
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.976.100	43.165.000	95,97
2.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	121.774.600	105.580.200	86,70
2.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.655.700	374.873.649	87,05
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.181.500	8.057.500	98,48

2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.092.400	26.820.100	99,00
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.857.200	9.821.000	99,63
2.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.674.600	36.582.750	99,75
2.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.496.000	19.276.050	89,67
2.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.320.000	80,00
2.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.954.000	269.996.249	83,86
2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.117.563	538.060.063	96,23
2.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.292.063	37.272.003	90,26
2.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.825.500	500.788.060	96,71
2.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.607.400	163.599.137	65,02
2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.283.400	129.263.637	60,32
2.6.2	Pemeliharaan Mebel	6.918.000	6.050.000	87,45
2.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.406.000	28.285.500	93,03
2.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	Tidak menjadi prioritas karena pindah Gedung kantor
JUMLAH		4.582.028.306	4.208.583.280	91,85

Selanjutnya realisasi dan capaian sasaran strategis dijabarkan melalui tabel sebagai berikut:

No	Sasaran		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Uraian	Indikator					
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,57	0,47	82,46	87,77	0,94
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,70	84,80	101,31	92,96	1,09

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai adanya kendala/hambatan di dalam pelaksanaannya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
C. Maksud Dan Tujuan.....	8
D. Dasar Hukum	8
E. Aspek-Aspek Strategis	11
F. Isu-Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN.....	18
1. Analisi Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi Tahun 2024	19
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2024	24
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra ...	26
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM).....	26
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	51
1. Alokasi Belanja Per Sasaran Pembangunan	54
2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran	55
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
C. PRESTASI/PENGHARGAAN.....	58
BAB IV PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. LANGKAH PERBAIKAN	60

LAMPIRAN	66
A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026	67
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	69
C. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	74
D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aspek-Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024	11
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024	15
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024	17
Tabel 3.1 Capaian Kinerja / Sasaran Tahun 2024	18
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2024	24
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Instansi sejenis	25
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	26
Tabel 3.5 Target Pencapaian SPM	27
Tabel 3.6 Data Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana (Bahaya Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, dan Kebakaran Gedung-Pemukiman Kota Blitar Tahun 2024)	29
Tabel 3.7 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024....	30
Tabel 3.8 Data Pelatihan Kebencanaan di Kota Blitar Tahun 2024.....	38
Tabel 3.9 Data Jenis Pelatihan Kebencanaan di Kota Blitar Tahun 2024..	38
Tabel 3.10 Data Jumlah Korban Bencana di Kota Blitar Tahun 2024.....	43
Tabel 3.11 Data Layanan Pusdalops di Kota Blitar Tahun 2024.....	44
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	51
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran untuk Setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024	51
Tabel 3.14 Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Pembangunan Tahun	

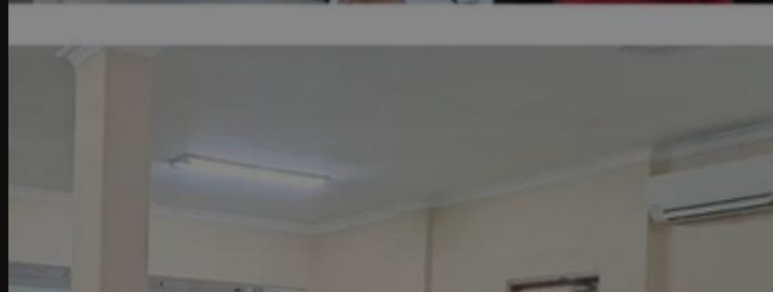
2024	55
Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2024.....	55
Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	57
Tabel 4.1 Rencana Tindaklanjut LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar	4
Diagram 1.1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan....	7
Diagram 1.1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	7
Diagram 1.1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Struktrual/Fungsional.....	8



BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permen-PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun anggaran sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan selama satu tahun anggaran.

Di samping sebagai kewajiban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Dapat dikatakan pula bahwa LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sendiri dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah. Di dalamnya, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar diharapkan

dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, sebagai Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan trantibum serta perlindungan masyarakat sub-bidang/urusan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut:

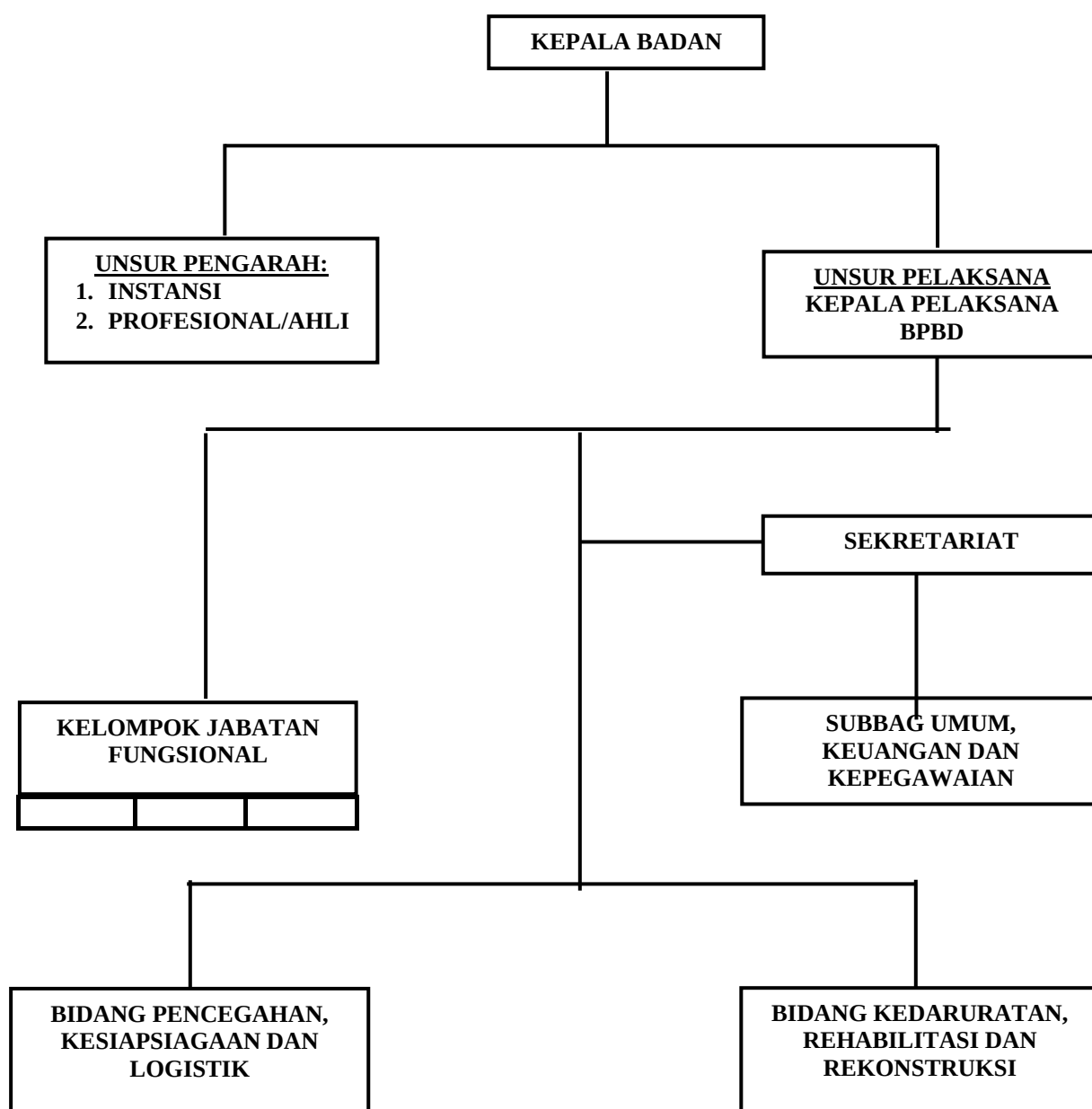
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar juga menjalankan tugas atau kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. Menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
7. Melaksanakan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
9. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
10. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat Badan, 2 (dua) Bidang, 1 (satu) Sub-Bagian, Unsur Pelaksana, dan Unsur Pengarah, sebagaimana diterangkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
 (Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022)



Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, terdiri dari:

- Kepala Badan.
- Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana BPBD), membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- Unsur Pengarah (Instansi dan Profesional/Ahli)
- Sekretariat Pelaksana, membawahi:

- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik.
- Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan struktur organisasi diatas, komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan :

- S3 berjumlah : - orang
- S2 berjumlah : - orang
- S1 berjumlah : 9 orang
- D3 berjumlah : 1 orang
- SLTA berjumlah : 4 orang
- SLTP berjumlah : - orang

b. Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

- Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang
- Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang
- Pembina (IV/a) : 3 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 3 orang
- Penata (III/c) : - orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : 1 orang
- Penata Muda (III/a) : 5 orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang
- Pengatur (II/c) : - orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : - orang
- Pengatur Muda (II/a) : - orang
- Juru Tk. I (I/d) : - orang
- Juru (I/c) : - orang
- Juru Muda Tk. I (I/b) : - orang
- Juru Muda (I/a) : - orang

c. Jabatan Struktural dan Fungsional yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar terdiri dari :

- Eselon II/a : - orang
- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 2 orang
- Eselon IV/a : 1 orang
- Fungsional : 2 orang

Penyetaraan

1 Berdasarkan jenis kelamin :

- Laki-laki : 8 orang
- Perempuan : 6 orang

2 Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional :

- Diklat Pim IV : 3 orang
- Diklat Pim III : 4 orang
- Diklat Pim II : - orang
- Diklat : 1 orang

Fungsional

Sumber: *Data Tahun 2024*

Dukungan Personil Lainnya /THL :

PPPK	1 Orang
PTT	1 Orang
THL (URC, Pusdalops, Agen Informasi Bencana, Keamanan, Kebersihan, Pelayanan Umum)	17 Orang

Diagram 1.1.1

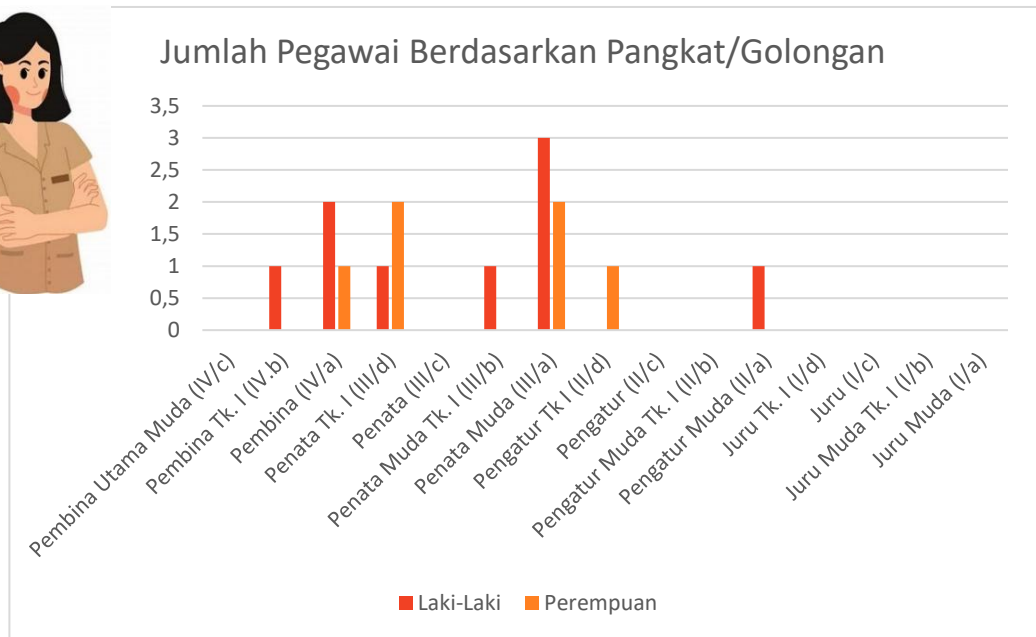


Diagram 1.1.2

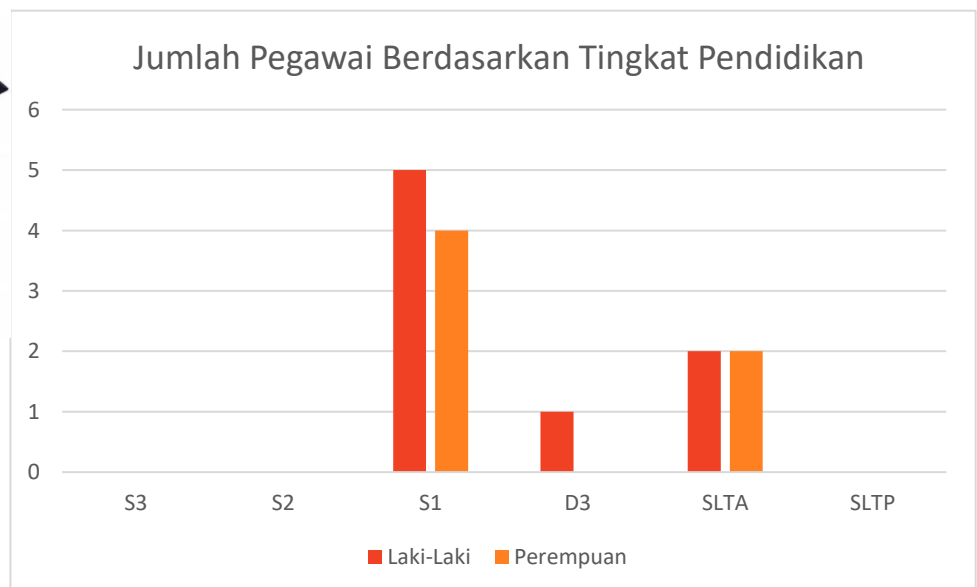
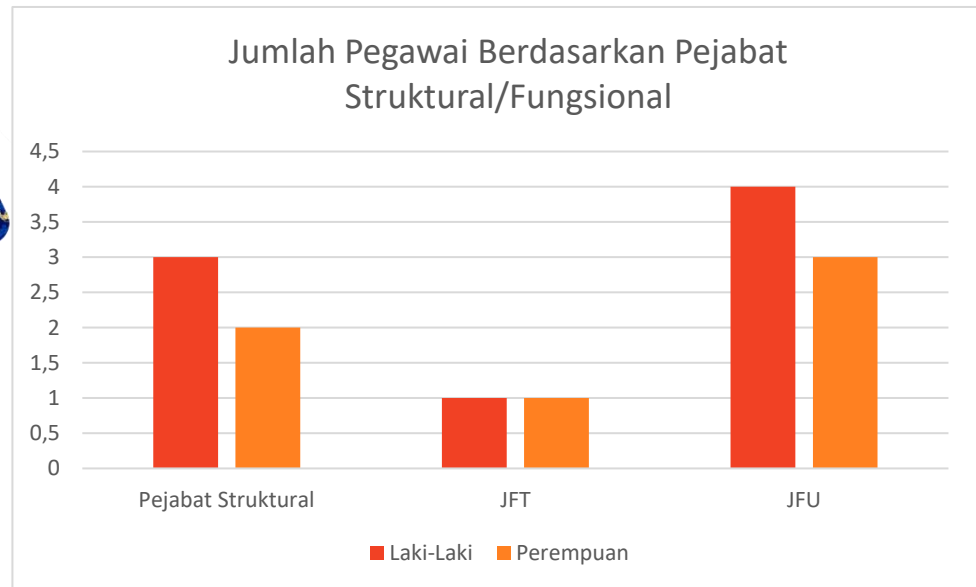


Diagram 1.1.3



C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan sarana untuk mengkomunikasikan serta menjawab apa yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan dan sekaligus menggambarkan bagaimana proses pencapaiannya pada tahun 2024.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian target sasaran tahun anggaran 2024 serta sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
 21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
 25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang

- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

E. Aspek-aspek Strategis

Aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, meliputi:

Tabel 1.1
Aspek-aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. Program kerja OPD yang tersusun 2. Telaksananya inventarisasi, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data	1. Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dari tingkat pusat hingga daerah 2. Semakin besarnya perhatian dari

3. Tersedianya pengendalian, monitoring, dan evaluasi program 4. Laporan akuntabilitas yang tersusun	Pemerintah maupun masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal pengurangan resiko bencana 3. Mulai tingginya koordinasi dan Kerjasama antar pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>)
(-) Kelemahan	(-) Ancaman
1. Kurangnya jumlah SDM dengan kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana 2. Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1. Kendala sosialisasi paradigma baru karena masih banyaknya masyarakat belum memahami pentingnya kegiatan penanggulangan bencana 2. Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas yang merupakan kemampuan internal organisasi dalam penanggulangan bencana 3. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana

F. Isu-isu Strategis

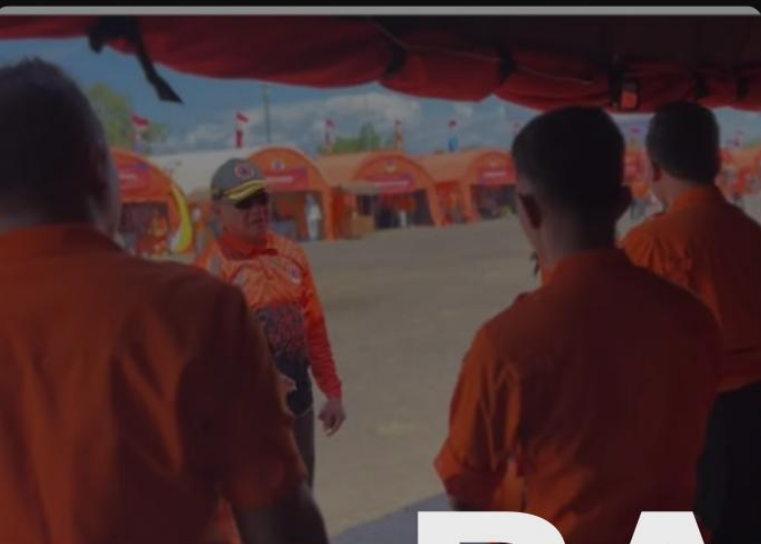
Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan urusannya, permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana yang memadai dan sesuai dengan standar minimal BNPB;
3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan resiko bencana;
4. Belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana; dan
5. Terbatasnya SDM kebencanaan yang memiliki kompetensi.

Adapun, isu-isu strategis yang terkait dengan kebencanaan di antaranya:

1. Belum adanya regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standart minimal BNPB;

3. Mengedukasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kelurahan dan kecamatan tangguh bencana;
4. Peningkatan kapasitas SDM, baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program – program yang diselenggarakan oleh Pusat dan Pemerintah Propinsi;
5. Membangun sistem pelayanan informasi bencana yang terintegrasi pada setiap fase bencana;
6. Peningkatan fasilitas bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan korban terdampak;
7. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha melalui program CSR baik pada fase pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana.
8. Peningkatan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah, maupun lembaga – lembaga terkait kebencanaan, swasta, dan masyarakat;



BAB II



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 – 2026

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan. Sehingga, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2024 dan seterusnya dapat mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat”***.

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Visi dan Misi Kota Blitar tersebut kemudian menghasilkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Erat kaitannya dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar tersebut, maka dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

Adapun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran pada Misi Keempat Kota Blitar: **Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan**, dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar kemudian diuraikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024

RPJMD TAHUN 2021 – 2026	RENSTRA TAHUN 2021 – 2026
VISI : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat MISI 4 : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup SASARAN : Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	TUJUAN : 1. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah INDIKATOR : 1. Indeks Ketahanan Daerah 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah SASARAN : 1. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana 2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah INDIKATOR : 1. Indeks Kapasitas Daerah 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah PROGRAM : 1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 diuraikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0.57
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,70)

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	980.761.824	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.601.266.482	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	J U M L A H	4.582.028.306	



BAB III



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Blitar tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan rencana dengan realisasi berdasarkan data-data pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2024

KINERJA UTAMA/TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,57	0,47	82,46
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,70)	A (84,80)	101,31

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

A. Indeks Kapasitas Daerah

IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Penilaian IKD dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*) terkait daftar isian (kuesioner) yang isi jawabannya disepakati bersama oleh multistakeholders yang disesuaikan dengan jenis dan karakter ancaman bencana di wilayah tersebut. IKD didapatkan dari isian kuesioner/daftar pertanyaan dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri terdapat 7 Prioritas dan 71 Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti dukung (*evidence*).

Dari 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas dengan bobot/agregat yang berbeda-beda, meliputi :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 6%)
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 6%)
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot : 7,5%)
4. Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 10,5%)
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot : 21%)
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot : 35%)
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 14%)

Akumulasi dari nilai tiap-tiap prioritas akan menghasilkan nilai “Indeks Ketahanan Daerah” dengan range kelas :

IKD < 0,4	: Rendah
0,4 < IKD < 0,8	: Sedang
IKD > 0,8	: Tinggi

Hasil Pengukuran terhadap IKD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

-Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 0,96%)

- Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 0,77%)
- Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot : 0,40%)
- Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 0,55%)
- Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot : 0,55%)
- Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot : 0,35%)
- Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 0,26%).

Sehingga capaian Indeks Kapasitas Daerah Kota Blitar tahun 2024 : **0,47**.

Hal ini dikandung maksud kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu dikategorikan **SEDANG**. Capaian ini bisa dikatakan belum memenuhi target. Adapun permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

Permasalahan	Tindak Lanjut	Faktor Pendukung
1. Belum adanya kebijakan /regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana 2. Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	1. Pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan pembahasan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di DPRD namun belum ditetapkan, sehingga perlu dikoordinasikan lebih lanjut pada tahun 2025 ke Bagian Hukum 2. Melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama OPD terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk	1. Tersusunnya Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana 2. Tersedianya kelengkapan dokumen dan data dukung indeks kapasitas daerah yang bersumber dari lintas OPD 3. Komitmen instansi dan OPD terkait dalam pemenuhan bukti dukung / dokumen data IKD

	pengisian IKD Tahun 2025 3. Menyelenggarakan FGD agar secara simultan dan berkelanjutan meminta stakeholder menysisir Kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk ditingkatkan kinerja output masing-masing variabel dari setiap indikator	
--	---	--

B. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal dengan rincian nilai sebagai berikut :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30%	27,67
B	Pengukuran Kinerja	30%	21,42
C	Pelaporan Kinerja	15%	14,46

D	Evaluasi Internal	25%	21,25
J U M L A H		100%	84,80
Kategori A (Memuaskan)			

No	Permasalahan	Tindaklanjut	Faktor Pendukung
A	Dokumen perencanaan kinerja telah disusun, namun kinerja dan indikator kinerja sasaran dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan memenuhi kriteria SMART (3.03.05)	Mereviu Kembali dokumen perencanaan	Komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP
B	Pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan telah dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik (tribulanan). Namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi maupun kebijakan dalam mencapai kinerja (3.03.05)	Melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja	

C	Informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan, dan telah dimanfaatkan secara optimal, serta telah mengungkapkan seluruh pencapaian dan kualitas kinerja namun masih terdapat pegawai yang belum memahami dan peduli atas penyajian informasi dalam laporan kinerja (3.03.05)	Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai	
D	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti namun belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta belum sepenuhnya dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (3.03.05)	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	

Realisasai capaian Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar **84,80 dengan kategori A (Memuaskan)**. Guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil evaluasi.

Tabel 3.2

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,53	0,40	0,55	0,43	0,57	0,47
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A (80)	Belum menjadi sasaran penilaian Irda	A (80)	A (83,70)	A (83,70)	A (84,80)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Pada tahun 2022 target Indeks Kapasitas Daerah 0,53 realisasi 0,40 dengan capaian kinerja sebesar 75,47 %. Tahun 2023 target Indeks Kapasitas Daerah sebesar 0,55 realisasi 0,43 sehingga capaian kinerja sebesar 78,18 %.

Sedangkan pada tahun 2024 target Indeks Kapasitas Daerah yang ditetapkan sebesar 0,57 dan realisasi adalah 0,47. Sehingga capaian kinerja sebesar 82,46 %. Terdapat peningkatan nilai indeks sebesar 0.04 dari tahun sebelumnya.

Target SAKIP OPD pada tahun 2022 A(80) namun belum menjadi sasaran penilaian Irda karena OPD baru saja berdiri, Tahun 2023 target nilai SAKIP OPD A(80) realisasi A(83,70) sehingga capaian kinerja sebesar 104,62 %, sedangkan Pada tahun 2024 target nilai SAKIP Badan penanggulangan Bencana Daerah 83,70 dan nilai yang diperoleh sebesar 84,80 dengan kategori A (Memuaskan), sehingga capaian kinerja sebesar 101,31%.

sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar ditujukan untuk mewujudkan misi keempat Kota Blitar: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan
Instansi Sejenis

BPBD Kota Blitar dan BPBD Kabupaten Probolinggo memiliki indikator tujuan yang sama, yaitu indeks ketahanan daerah. IKD merupakan tools atau alat yang digunakan untuk mengukur seberapa tangguh upaya daerah dalam menghadapi bencana. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan adanya optimalisasi sinergitas antar OPD dan elemen pendukung.

Indikator Kinerja		Target tahun 2024		Realisasi tahun 2024	
BPBD Kota Blitar	BPBD Kab Probolinggo	BPBD Kota Blitar	BPBD Kab Probolinggo	BPBD Kota Blitar	BPBD Kab Probolinggo
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,60	0,61	0,47	0,61

Sumber : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 – 2026

Tabel 3.4**3.Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Kinerja Tahun 2024		Tingkat kemajuan
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,61	0,57	0,47	77,05
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,72	83,70	84,80	101,29

Faktor pendukung Untuk mencapai target Indeks yang telah ditentukan pada akhir Renstra adalah ;

1. Tersusunnya Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Tersedianya kelengkapan dokumen dan data dukung indeks kapasitas daerah yang bersumber dari lintas OPD
3. Komitmen instansi dan OPD terkait dalam pemenuhan bukti dukung / dokumen data IKD

Faktor pendukung Untuk mencapai target nilai SAKIP yang telah ditentukan pada akhir Renstra adalah adanya komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP, terutama membudayakan monev kinerja berjenjang dan dilaksanakan secara periodik (tribulanan).

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berusaha menerapkan SPM secara efektif dan meningkatkan mutu pelayanan.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Sub Urusan Bencana yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana adalah :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Tabel 3.5

TARGET PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2024	Target Nasional	Keterangan
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	Telah Dicapai Tahun 2024, Dipertahankan Capaiannya pada Tahun 2025
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	Telah Dicapai Tahun 2024, Dipertahankan Capaiannya pada Tahun 2025

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Telah Dicapai Tahun 2024, Dipertahankan Capaiannya pada Tahun 2025
---	--	--	------	------	--

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri No.59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Pelayanan Informasi Rawan Bencana.**

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana, Pada tahun 2024, pelayanan informasi rawan bencana dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi bencana melalui media sosial (Instagram, Youtube, website), media elektronik (siar di radio) Di samping itu juga melakukan sosialisasi tatap muka dan edukasi kepada masyarakat per jenis bencana sebagaimana terlampir. Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana diperoleh dari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

DATA JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN RAWAN BENCANA YANG MEMPEROLEH INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI JENIS ANCAMAN BENCANA (BAHAYA GEMPA BUMI, CUACA EKSTRIM, DAN KEBAKARAN GEDUNG- PEMUKINAN KOTA BLITAR TAHUN 2024)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN RAWAN BENCANA YANG MEMPEROLEH INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI JENIS ANCAMAN BENCANA	JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN RAWAN BENCANA SESUAI JENIS ANCAMAN BENCANA
1	KEPANJENKIDUL	612	612
2	SANANWETAN	195	195
3	SUKOREJO	350	350
J U M L A H		1.157	1.157
PERSENTASE		100 %	

Permasalahan yang dihadapi :

Belum memiliki fasilitator yang kompeten dan memenuhi secara jumlah dalam memberikan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kebencanaan

Tindak Lanjut :

1. Bekerjasama dengan FPRB sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Relawan Penanggulangan Bencana
2. Mendorong potensi SDM yang ada, untuk mengikuti Pelatihan / Bimtek Mitigasi Bencana

Faktor Pendukung :

- 1.Tersedianya fasilitator yang memiliki kompetensi secara kualitas dan kuantitas
2. Sudah terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang membantu memberikan sosialisasi KIE terkait upaya pengurangan risiko / mitigasi bencana

Tabel 3.7
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024

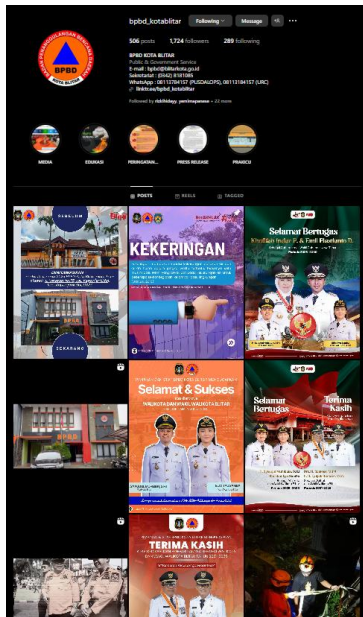
No	Tempat	Acara	Keterangan
1.	Kantor BPBD Kota Blitar (UNISBA)	Sosialisasi Kesiapsiagaan Anak dalam Bencana	
2.	Aula Polkesma	Sarasehan Kesiapsiagaan Bencana dalam Rangka Hari Kesiapsiagaan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	
3.	SMAN 3 Blitar	Sosialisasi dan Simulasi Gempa Dalam Rangka Hari Pramuka	
4.	Aula Polkesma	Rapat Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana Hidrometeorologi di Masing-Masing Wilayah Keltana dan FPRB	
5.	DJP Kantor Pajak	Simulasi Evakuasi Bencana Gempa	

6.	SMPN 9 Blitar	Sosialisasi dan Simulasi Evakuasi Bencana Gempa	
7.	Pasar Pon	Sosialisasi dan Simulasi Kebencanaan	
8.	SDN 1 Bendogerit	Simulasi Kebencanaan	
9.	SMPN 8 Blitar	Simulasi Kebencanaan dan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	
10.	Kelurahan Pakunden	Pembinaan, Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana) Pakunden	

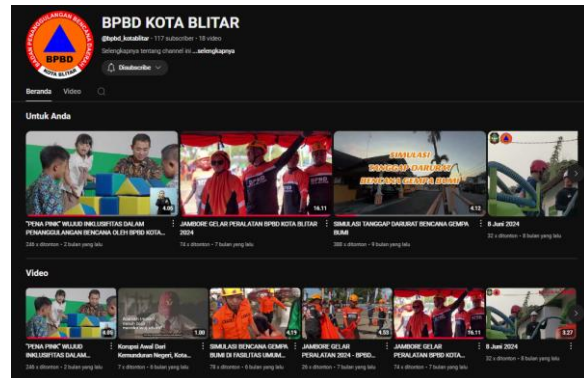
11.	Kelurahan Karangsari	Musyawarah Masyarakat Kelurahan Karangsari Kota Blitar	
12.	Kelurahan Tlumpu	Musyawarah Masyarakat Kelurahan Tlumpu Kota Blitar	
13.	Kelurahan Bendogerit	Pembinaan, Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana) Bendogerit	
14.	Kelurahan Sukorejo	Pembinaan, Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana) Sukorejo	
15.	Balai Koesoema Wicitra	Sosialisasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	

16. TKN Pembina Kecamatan Kepanjenkidul

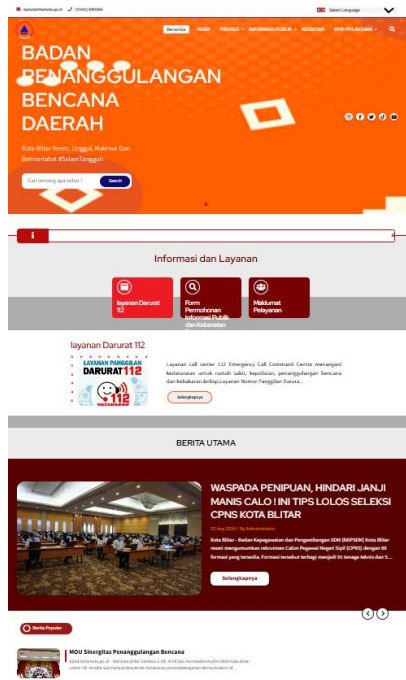
Prasiaga Persari Sebagai Upaya Meningkatkan Integritas Tunas Bangsa Yang Berbudaya



Instagram



Youtube



Website

SIARAN IKLAN

BPBD KOTA BLITAR

Order

Nama produk

Nama penyiaran

Untuk kepentingan

BPBD KOTA BLITAR

012/MKR/ORD.IKL/2024/7

BPBD VS HIDROMETEOROLOGI 24 (60)

01 - 29 FEBRUARI 2024



www.blitar.go.id

Manajemen 101 Bn

Tanggal

WAKTU SIARAN

01-Feb-24	06:36	08:24	10:04	12:37	14:36	16:22
02-Feb-24	06:54	08:06	10:53	12:37	14:54	16:10
03-Feb-24	06:15	08:38	10:29	12:37	14:15	16:02
04-Feb-24	06:31	08:40	10:56	12:42	14:31	16:12
05-Feb-24	06:40	08:18	10:55	12:26	14:40	16:35
06-Feb-24	06:37	08:49	10:53	12:22	14:26	
07-Feb-24	06:37	08:20	10:50	12:36	14:14	
08-Feb-24	06:37	08:28	10:38	12:32	14:41	
09-Feb-24	06:42	08:25	10:27	12:24	14:06	
10-Feb-24	06:26	08:13	10:10	12:35	14:22	
11-Feb-24	06:40	08:14	10:09	12:28	14:14	
12-Feb-24	06:14	08:11	10:22	12:34	14:21	
13-Feb-24	06:38	08:49	10:35	12:50	14:16	
14-Feb-24	06:12	08:55	10:24	12:32	14:33	
15-Feb-24	06:35	08:20	10:35	12:14	14:20	
16-Feb-24	06:21	08:37	10:10	12:36	14:15	
17-Feb-24	06:14	08:10	10:40	12:10	14:13	
18-Feb-24	06:41	08:24	10:16	12:12	14:04	
19-Feb-24	06:27	08:29	10:27	12:14	14:16	
20-Feb-24	06:27	08:34	10:29	12:36	14:22	
21-Feb-24	06:29	08:45	10:22	12:42	14:15	
22-Feb-24	06:22	08:20	10:24	12:09	14:16	
23-Feb-24	06:24	08:32	10:22	12:11	14:22	
24-Feb-24	06:22	08:14	10:36	12:34	14:14	
25-Feb-24	06:13	08:28	10:49	12:25	14:25	
26-Feb-24	06:04	08:19	10:43	12:35	14:10	
27-Feb-24	06:16	08:17	10:46	12:55	14:26	
28-Feb-24	06:22	08:22	10:19	12:54	14:34	
29-Feb-24	06:15	08:31	10:20	12:22	14:29	

JUMLAH:

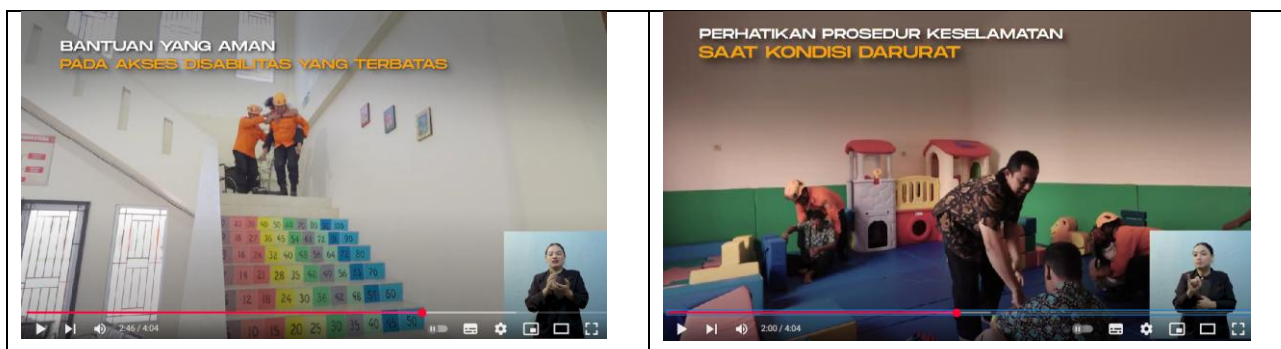
150 x sisr

CATATAN

Blitar, 29 FEBRUARI 2024

Bagian Iklan

Siar Radio Mayangkara



Dok. Inovasi Pena Pink

Guna Memenuhi hak setiap warganya untuk mendapatkan penanganan yang sama sesuai tingkat kebutuhannya saat bencana itu datang, sesuai dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD telah mewujudkannya dalam video inovasi pena pink (Pendidikan Siaga Bencana Kelompok Inklusi) untuk meningkatkan edukasi kesiapsiagaan bencana khususnya kepada penyandang disabilitas.

Dengan kondisi geografis yang rentan terhadap beberapa kategori bencana, BPBD Kota Blitar menyadari bahwa bencana dapat berdampak lebih parah bagi penyandang disabilitas fisik. Penanggulangan bencana yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan khusus mereka sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Di Kota Blitar, terdapat berbagai kategori disabilitas yang kita jumpai, dan masing-masing kondisi tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi bencana, seperti tantangan dalam komunikasi, mobilitas, dan kondisi mental yang terbatas.

Dalam mitigasi terhadap kondisi tanggap darurat pada situasi bencana terdapat 4 poin penting, antara lain:

1. Memiliki tanda darurat dan jalur evakuasi yang aman untuk dilalui saat terjadi kondisi darurat,
2. Terdapat titik kumpul sebagai titik aman yang dituju pada kondisi darurat,
3. Proaktif bertukar cara untuk berkomunikasi, baik itu melalui bahasa isyarat atau alat bantu lainnya,
4. Memastikan akses lokasi yang inklusif pada penyandang disabilitas.

Saat kondisi darurat terjadi, perlu memperhatikan prosedur keselamatan yang

inklusif dalam evakuasi bagi penyandang disabilitas seperti:

1. Personel yang terlatih dalam memberikan petunjuk atau melakukan evakuasi kepada penyandang disabilitas
2. Tersedianya alat bantu yang sesuai kebutuhan mereka
3. Komunikasi yang efektif.

Pastikan kondisi sekitar atau diri kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat, tulisan, atau alat bantu lainnya.

4. Akses yang inklusif.

Pastikan pintu dan lorong mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Menciptakan penanggulangan bencana yang inklusif adalah tanggungjawab kita semua untuk memastikan akses yang setara terhadap informasi, fasilitas, dan layanan bantuan; dan melakukan edukasi dan kolaborasi lintas sektor agar kita bersama-sama dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.



Dok. Rambu bencana dan Papan Informasi Bencana

Rambu Bencana memberikan informasi tentang aktivitas yang dilarang dilakukan di Kawasan rawan bencana. Rambu bencana dapat digunakan untuk berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan

Papan Informasi Bencana memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu seperti Kawasan rawan bencana, bahaya, kejadian bencana yang pernah terjadi, dan Lokasi tempat kumpul sementara atau tempat

pengungsian. Papan informasi bencana dapat terbuat dari pelat alumunium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya

Rambu evakuasi dan papan informasi bencana merupakan bagian dari sosialisasi prosedur evakuasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan ancaman Sign atau rambu arah jalur evakuasi digunakan untuk menginformasikan penduduk secara jelas tentang arah titik kumpul. Warna yang dipakai adalah hijau dengan garis tepi, lambang, warna huruf, atau angka putih sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Infomasi Bencana. Berikut rambu bencana dan papan informasi bencana yang terpasang di wilayah Kota Blitar :

Rambu Bencana

No	Lokasi	Jumlah
1	Mal Pelayanan Publik	2
2	Perpustakaan Kota Blitar	2
3	DISPORA	1
4	Istana Gebang	2
5	PIPP Kota Blitar	1
6	RPH Dimoro	1
7	Pasar Dimoro	2
8	Pasar Ikan KOUA Blitar	1
9	Pasar Templek	2
10	Pasar Pahing	1
11	Pusat Kuliner (Depan PU) Kota Blitar	1
12	Taman Kehati	1
13	Lapangan BTN Griya Pakunden Permai	2
14	Kelurahan Bendogerit	1
15	Kelurahan Sentul	1
16	Kelurahan Tlumpu	1
17	Kelurahan Bendo	1
18	Polsek Kepanjenkidul	1
19	Kelurahan Tanggung (Masjid Al Hikmah)	1
20	Kelurahan Tanggung (Lapangan Tanggung)	1
21	Kelurahan Tanggung (Masjid Baitul Manan)	1
22	Kelurahan Blitar	1

23	SMPN 1 Kota Blitar	1
24	SMPN 2 Kota Blitar	1
25	SMPN 4 Kota Blitar	1
26	SMPN 5 Kota Blitar	1
27	SMPN 6 Kota Blitar	1
28	SMPN 8 Kota Blitar	1
29	SMPN 9 Kota Blitar	2
30	SDN Kepanjenkidul 1	1
31	SDN Sentul 1	1
32	SDN Bendo	2
33	SDN Bendogerit 1	1
34	SDN Gedog 2	1
35	SDN Karangtengah 1	1
36	SDN Kepanjenkidul 2	1
37	SDN Kepanjenlor 2	1
38	SDN Pakunden 1	1
39	SDN Sananwetan 3	1
40	SDN Sentul 4	1
41	SDN Tanggung 1	1
42	SDN Tanjungsari 2	1
JUMLAH		50

Papan Informasi Bencana

No	Lokasi	Jumlah
1	Samping SMPN 7 Blitar	1
JUMLAH		1

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau disesuaikan dengan jenis bencana yang ada. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diperoleh dari jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana. $427 : 427 \times 100 \% = 100\%$ sebagaimana tabel di bawah ini ;

Tabel 3.8

**DATA PELATIHAN KEBENCANAAN DI KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

NO.	KELURAHAN	JUMLAH WARGA DAERAH RAWAN BENCANA
1	KEPANJENKIDUL	198
2	SANANWETAN	185
3	SUKOREJO	44
J U M L A H		427

Tabel 3.9

**DATA JENIS PELATIHAN KEBENCANAAN DI KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Pelatihan Penanganan Dasar Bencana bagi Forum Pengurangan Risiko Bencana	172
2	Gladi Kesiapsiagaan Hidrometeorologi	255
	Jumlah	427

Permasalahan yang dihadapi :

1. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan OPD teknis terkait pencegahan bencana
2. Belum adanya anggaran untuk operasionalisasi Keltana di masing-

masing kelurahan

Tindaklanjut :

1. Meningkatkan Komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait dan Relawan kebencanaan
2. Mengajukan usulan untuk penambahan anggaran operasionalisasi keltana pada setiap kelurahan

Faktor Pendukung :

1. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait
2. Sudah terbentuknya Keltana di masing-masing kelurahan dengan diterbitkannya SK

No	Tempat	Acara	Keterangan
1.	Kelurahan di wilayah Kota Blitar	Pelatihan Penanganan Dasar Bencana	
2.	Halaman Pemkot Blitar	Gladi Kesiapsiagaan Hidrometeorologi	



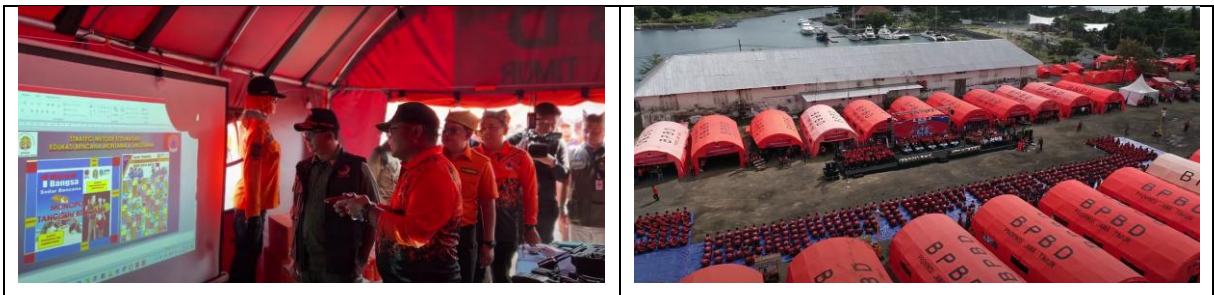
Dokumentasi Latihan Bersama RAPI Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan

terhadap bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar menggelar kegiatan Latihan Bersama dalam rangka Peningkatan Capacity Building. Kegiatan ini diikuti oleh Relawan Sosial Blitar, perwakilan anggota Keltana se-Kota Blitar, anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana, RAPI, Mahasiswa Polkesma dan URC BPBD Kota Blitar. Kegiatan capacity building tersebut mencakup berbagai materi seperti manajemen Posko dan Ops SAR, High Angle Rescue Technique, Medical First Responder dan menguasai operasional alat komunikasi SAR.

Latihan bersama peningkatan capacity building ini dilaksanakan di Agrowisata Blimbing Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan praktek simulasi pertolongan korban dari tempat ketinggian

Dengan diadakannya Peningkatan Capacity Building ini diharapkan dapat membantu menghindari ancaman bahaya dari bencana. Dengan dibekali keterampilan dan pengetahuan yang tepat, kita dapat bereaksi dengan cepat, menyelamatkan nyawa, dan meminimalkan kerusakan.



Dokumentasi Gelar Peralatan di Kab. Banyuwangi Tahun 2024

BPBD Kota Blitar berpartisipasi dalam kegiatan Gelar Peralatan untuk meningkatkan keterampilan personil BPBD Kabupaten/Kota dalam mengoperasikan peralatan penanggulangan bencana. Gelar Peralatan Kebencanaan se-Jawa Timur yang diadakan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur Bersama BNPB ini digelar di Pantai Marina Boom Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 13 s/d 16 Juli 2024. Kegiatan tersebut diikuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada kegiatan tersebut Masing-masing daerah memamerkan kesiapan peralatan dan logistik yang dimiliki sebagai persiapan menghadapi bencana. Selain itu

juga digelar lomba ketrampilan penanganan bencana, antara lain: Lomba Bongkar pasang Tenda, Lomba Yel-yel, Chainsaw Competition, Lomba Penataan Logistik dan Water Rescue.

Dari hasil pemeriksaan di masing-masing tenda kabupaten/kota, terlihat bahwa Jawa Timur telah cukup siap menghadapi risiko kebencanaan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar ada sinergi dan kolaborasi antar BPBD Kabupaten /Kota



Pelatihan HART tahun 2024

Guna meningkatkan kapasitas URC dalam melakukan penyelamatan di ketinggian dengan aman (Evakuasi korban dari bencana Gedung bertingkat), maka BPBD Kota Blitar bekerjasama dengan BASARNAS Surabaya melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pertolongan pada Ketinggian High Angle Rescue Technique (HART) yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 November 2024 dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar bertempat di Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Surabaya. Hal ini dilakukan mengingat saat ini pertumbuhan jumlah bangunan tinggi di Kota Blitar mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, kegiatan di luar ruangan atau alam bebas yang mengakses ketinggian dan medan curam saat ini menjadi tren wisata dan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki risiko yang tinggi yaitu terjadinya kecelakaan karena bahaya ketinggian. Sehingga dibutuhkan kemampuan penyelamatan di medan yang memiliki perbedaan ketinggian dan sulit diakses tanpa peralatan yang memadai.

High Angle Rescue, disebut juga dengan vertical rescue, adalah upaya

pertolongan di lingkungan vertical atau high angle, di mana terdapat risiko bahaya yang sangat besar. Peserta akan diajarkan keterampilan di bidang penyelamatan kecelakaan di ketinggian baik dengan ascending, lowering, descending dan belaying. Pengetahuan terkait evakuasi di tempat tinggi misalnya teknik penyelamatan dan pertolongan yang tepat pada korban di bangunan atau gedung yang runtuh, pemindahan korban dari tempat yang tinggi, penyelamatan korban bencana alam seperti tanah longsor, kecelakaan di gunung, percobaan bunuh diri, kasus tercebur dalam sumur, ataupun jika ada pendaki gunung yang terpeleset dan jatuh ke jurang, mereka akan bisa membantu menolong dan mengevakuasi sehingga dapat menyelamatkan jiwa dengan aman.

Tindakan yang terlambat, kurangnya SDM, minimnya pengetahuan dan keterampilan teknik-teknik penyelamatan atau evakuasi dapat menyebabkan korban tidak tertolong. Sehingga kegiatan bimbingan teknis HART ini sangat bermanfaat bagi Tim URC dalam rangka meningkatkan kapasitas URC ketika melakukan evakuasi di tempat ketinggian atau medan yang sulit dijangkau, serta dapat membentuk tim yang kompeten dan bertanggungjawab dalam misi penyelamatan khususnya pada keadaan darurat.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana tahun 2024 adalah 100% yaitu $105/105 \times 100\%$ yang diperoleh dari jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana

Tabel 3.10
DATA JUMLAH KORBAN BENCANA
DI KOTA BLITAR TAHUN 2024

No	Kejadian Bencana	Jumlah Korban (Orang)	Jumlah Korban Yang Berhasil Ditangani (Orang)	Keterangan
1.	Kekeringan	91	91	
2.	Angin Kencang	8	8	
3.	Tanah Longsor	1	1	
4.	Laka Air	1	1	
5.	Kebakaran Gedung dan Permukiman	4	4	
JUMLAH		105	105	

Tabel 3.11
DATA LAYANAN PUSDALOPS
DI KOTA BLITAR TAHUN 2024

No	Layanan Kebencanaan	Jumlah Kejadian	Jumlah Warga Terdampak Tertangani	Keterangan
1.	Banjir	2	-	
2.	Tanah Longsor	5	1	
3.	Cuaca Ekstrim	75	-	
4.	Kekeringan	1	474	
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	2	-	
6.	Kebakaran Gedung dan Permukiman	3	4	
7.	Gempa Bumi	1	-	
8.	Laka Air	1	1	
JUMLAH		90	480	

Permasalahan yang dihadapi :

1. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi penanganan bencana
2. Terbatasnya Jenis Sarpras penanganan bencana (berdasarkan jenis penanganan bencana)

Tindak Lanjut :

1. Mengoptimalkan kerjasama dengan OPD teknis terkait penanganan bencana
2. Mengevaluasi standar minimal peralatan penanganan bencana

Faktor Pendukung :

1. Adanya dukungan dari OPD teknis dalam penanganan bencana
2. Adanya bantuan sarpras dari BPBD Provinsi Jatim dan BNPB

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana perlu dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan. Informasi disini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana maupun pasca bencana. Pada proses ini perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

UNIT OPERASI (URC)	PUSDALOPS
1. Melaksanakan pengkajian awal secara cepat dan tepat di lokasi kejadian / bencana dengan mengidentifikasi: a. cakupan lokasi kejadian / bencana b. jumlah korban c. kerusakan sarana dan prasarana d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan	Tugas Pokok: 1. Sebelum kejadian / bencana: memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin 2. Saat kejadian / bencana: memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat 3. Paska kejadian / bencana: memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah kejadian / bencana terjadi (penyedia

2. Melaksanakan tindakan awal dalam penanganan kejadian baik jiwa maupun harta benda 3. Mengaktivasi Posko PB / BPBD Kota Blitar 4. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan kejadian / bencana 5. Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan kejadian / bencana 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik: a. Laporan awal sesaat setelah tiba di lokasi kejadian / bencana b. Laporan berkala / perkembangan (harian dan insidentil) c. Laporan lengkap/akhir penugasan Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana	data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi) Fungsi: 1. Fungsi penerima, pengelola dan pendistribusi informasi kebencanaan 2. Fungsi penerima, pengolah, dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait masyarakat 3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif 4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana Tanggungjawab: 1. Secara Struktural: unit pemantau kebencanaan dari BPBD yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana 2. Secara Institusional: sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku 3. Secara Operasional: sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi, dan peran Pusdalops PB Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)
---	---

 PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nomor SOP	300.2.1/02/410.205/2023
	Tgl Pembuatan	12 Januari 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar  AGUS SUHERLI, SH. Pembina Tk. I NIP. 19680808 199703 1 006
Nama SOP	Informasi Kejadian Awal	

Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD; 6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Pusdalops PB. 3. Memahami mekanisme penanggulangan bencana. 4. Mempunyai kemampuan untuk pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana. 6. Mampu menggunakan komputer dan perangkat lunaknya. 7. Mampu menggunakan radio komunikasi.
Keterkaitan 1. SOP Kedaruratan	Peralatan/Perlengkapan 1. Buku Kerja / Pedoman, 2. Komputer Lengkap, Telepon, Seluler, Radio Komunikasi dan Server.
Peringatan : 1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bidang terkait.	Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang terkait

SOP INFORMASI AWAL BENCANA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Operator	Supervisor	Manager	Kalaksa	Kabid KL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Informasi Kejadian	mulai					Berita Kejadian	5 menit	Logsheet Kejadian	Terkait dengan SOP Penyusunan Laporan Harian / Khusus
2	Konfirmasi dan klarifikasi ketepatan berita						Telepon/Radio/Email/Whatsapp	10 - 30 menit	Informasi Kejadian (benar/tidak)	Pihak Terkait : Relawan, Jajaran Samping, OPD Terkait PB di level Kabupaten/Kota
3	Menginventarisir Data Kejadian (1. Lengkap / 2. Belum Lengkap)						Komputer, Format Teks Laporan Awal Kejadian	10 menit	Update Data Awal Kejadian	
4	Membuat Laporan Awal Kejadian						Komputer dan Printer, Format Teks Laporan Awal Kejadian	10 menit	Draft Laporan Awal Kejadian	
5	Mengoreksi, menganalisis & melaporkan ke Pimpinan (Meminta persetujuan untuk meneruskan Laporan ke Pihak Terkait)						Draft Laporan Awal Kejadian, Format Hasil Analisa	30 menit	Koreksi Laporan Awal Kejadian, Hasil Analisa	Pihak Terkait : Internal BPBD, Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur, Jajaran Samping, OPD Terkait PB
6	Mengoreksi, memberikan persetujuan serta mendisposisi ke Bidang KRR untuk Tindak Lanjut (1.Ya/2.Tidak)						Laporan Awal Kejadian, Hasil Analisa, Nota Dinas	30 menit	Disposisi untuk Menyiapkan Laporan Khusus ke Gubernur dan Perintah untuk Pergerakan TRC	Terhubung dengan SOP Kedaruratan apabila terjadi eskalasi / status Bencana Provinsi
7	Menyampaikan Laporan ke Pihak Terkait						Komputer, Whatsapp Group	5 menit	Laporan Awal Moda Teks Whatsapp Group	Pihak Terkait : Internal BPBD, Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur, Jajaran Samping, OPD Terkait PB
8	Menyimpan Laporan Awal sebagai bahan pembuatan Laporan Harian / Khusus	selesai					Komputer, Server	5 menit	Berkas Digital pada Hardisk Server	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

LAPORAN AKTIVITAS GUNUNG KELUD

PERIODE
04 FEBRUARI 2024 - 06 FEBRUARI 2024

TINGKAT AKTIVITAS: NORMAL

KEGEMPAAN
• Tektonik Lokal
Nihil.

REKOMENDASI
• Tektonik Jauh
4 kali gempa Tektonik Jauh dengan amplitudo 1-12 mm, S-P 14-31 detik dan lama gempa 42-318 detik.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

Prakiraan Cuaca Kota Blitar Per Wilayah Kecamatan

Berlaku Mulai : Sel 06 Feb 2024 / 07:00 WIB Sampai : Rab 07 Feb 2024 / 07:00 WIB

LOKASI	CUACA	Suhu °C	Angin km/jam	Kelembaban %
Kepanjendikud	[Icon]	22 - 30	30	75 - 95
Sananwetan	[Icon]	22 - 30	30	75 - 95
Sukorejo	[Icon]	23 - 30	30	75 - 95

LEGENDA
 Cerah, Cerah Berawan, Berawan, Berawan Tebal, Asap, Kabut, Hujan Ringan, Hujan Sedang, Hujan Lebat, Hujan Petir

PERINGATAN DINI 3 HARIAN Jawa Timur

Waspada hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada :

12 FEBRUARI 2024
 Pagi hari di wilayah Tuban, Magetan, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Situbondo, Pamekasan dan Sumenep.
 Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Gresik, Lamongan, Tuban, Jombang, Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Magetan, Ponorogo, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan dan Sumenep.
 Malam hari di wilayah Magetan.
 Dini hari di wilayah Sumenep.

13 FEBRUARI 2024
 Pagi hari di wilayah Bondowoso dan Situbondo.
 Siang-Sore hari di wilayah Sidoarjo, Lamongan, Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.
 Malam hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Bangkalan dan Sampang.
 Dini hari di wilayah Lamongan, Bangkalan dan Sumenep.

14 FEBRUARI 2024
 Pagi hari di wilayah Kab. Mojokerto, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Magetan, Batu, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Jember, Bondowoso dan Situbondo.
 Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Kab. Mojokerto, Batu, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Jember, Bondowoso dan Situbondo.
 Malam hari di wilayah Nganjuk.
 Dini hari di wilayah Nganjuk.

@infobmkgjuanda | stamet-juanda.bmkg.go.id

Informasi Peringatan Dini



Early warning system

Sebagai salah satu upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah Kota Blitar, BPBD Kota Blitar secara aktif menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan kondisi cuaca yang terjadi di wilayah Kota Blitar yang bersumber dari informasi resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Informasi tersebut didapatkan melalui saluran resmi BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo meliputi antara lain :

1. Release cuaca mingguan
2. Prakiraan cuaca harian
3. Peringatan dini cuaca tiga harian
4. Peringatan dini cuaca tiga jam sebelum kejadian

Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi BPBD Kota Blitar dalam mengantisipasi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi yang dapat menimpa sewaktu-waktu.

Untuk mengukur kekuatan getaran gempa yang terjadi, BMKG telah memasang alat berupa intensity meter di Kota Blitar yang mampu merekam getaran gempa, selanjutnya mengirimkan data ke pusat pengolahan data gempa BMKG dan diproses untuk mendapatkan hasil berupa peta guncangan.

Selain intensity meter, Kota Blitar juga telah mendapatkan fasilitas peralatan dari BMKG berupa monitor WRS INATEWS (Warning Receiver System Indonesian Tsunami Early Warning System). Fungsi WRS INATEWS BMKG Indonesia adalah memberikan peringatan dini terhadap potensi terjadinya tsunami di wilayah Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi gempa bumi bawah laut yang dapat menyebabkan tsunami dan memberikan peringatan kepada masyarakat serta pihak berwenang untuk mengambil tindakan pencegahan. Beberapa fungsi utama antara lain pendeteksian gempa bumi bawah laut, pengumpulan dan analisa data, peringatan dini serta pengembangan kesadaran masyarakat. WRS INATEWS yang ada di BPBD Kota Blitar terhubung secara online dengan website BMKG, dan memberikan informasi gempa bumi secara real time di seluruh wilayah Indonesia. Apabila ada informasi terkait Kota Blitar akan segera disebarluaskan melalui media informasi yang dikelola oleh PUSDALOP PB baik berupa media sosial maupun group whatsapp penanggulangan bencana.

BPBD Kota Blitar juga menerima bantuan Early Warning System (EWS) gempa bumi dari BPBD Provinsi Jawa Timur berupa sirine detektor yang akan menyala dan memberikan peringatan berupa nyala lampu dan sirine apabila terjadi guncangan gempa bumi dengan kekuatan 5 skala richter ke atas. Alat detektor ini berjumlah 2 (dua) unit, terpasang di kantor BPBD Kota Blitar dan di Pasar Legi.



Dok. BPBD Kota Blitar tahun 2024

Dalam rangka memantapkan langkah dan komitmen bersama guna meningkatkan kapasitas dan cepat tanggap dalam upaya penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Blitar yang diprakarsai oleh BPBD Kota Blitar mengadakan kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dengan KODIM 0808/Blitar dengan tema "Sinergi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana". Penandatanganan MoU ini berlangsung di Balai Kota Koesoema Wicitra pada hari Jumat tanggal 6 September 2024.

Walikota Blitar Drs. Santoso, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini digunakan sebagai pedoman untuk dapat mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas, meningkatkan komunikasi, harmonisasi tindakan guna mempercepat respon ketika terjadi bencana. Salah satu inisiatif yang direncanakan adalah pelatihan penanganan bencana di setiap kelurahan bersama dengan Keltana yang telah dibentuk BPBD Kota Blitar. TNI merupakan bagian pentaheliks dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kehadiran TNI dalam situasi bencana tidak hanya terjadi pada masa darurat bencana saja, namun juga pada masa sebelum hingga sesudah terjadinya bencana. Melalui penandatanganan kerjasama ini, ke depannya pemerintah bersama dengan TNI AD akan meningkatkan penguatan upaya-upaya penanggulangan bencana di Indonesia khususnya di Kota Blitar

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2024 jumlah anggaran belanja terperinci secara garis besar sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Operasi | : Rp. 4.484.998.346 |
| 2 | Belanja Modal | : Rp. <u>97.029.960</u> |
| Jumlah Belanja Daerah | | Rp. 4.582.028.306 |

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Operasi	4.484.998.346	4.138.035.280	92,26
2.	Belanja Modal	97.029.960	70.548.000	72,71
	J U M L A H	4.582.028.306	4.208.583.280	91,85

Dari jumlah anggaran **Rp 4.582.028.306** sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar **Rp 4.208.583.280** dengan capaian **91,85%**. Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja langsung program/kegiatan tahun 2024 tersebut dipaparkan melalui Tabel 3.13 di bawah ini:

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran untuk Setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	980.761.824	860.799.559	87,77
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	280.451.000	252.601.050	90,07
1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi,	280.451.000	252.601.050	90,07

	Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	468.852.324	426.017.260	90,86
1.2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	98.221.800	80.252.450	81,71
1.2.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	138.076.340	119.307.500	86,41
1.2.3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	60.858.800	60.144.500	98,83
1.2.4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	171.695.384	166.312.810	96,87
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	82.108.400	66.568.049	81,07
1.3.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	82.108.400	66.568.049	81,07
1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	149.350.100	115.613.200	77,41
1.4.1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	149.350.100	115.613.200	77,41
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	3.601.266.482	3.347.783.721	92,96

	PEMERINTAHAN DAERAH			
2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.651.400	8.191.000	76,90
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.188.000	6.017.500	97,24
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.463.400	2.173.500	48,70
2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.182.483.719	2.114.314.672	96,88
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.179.521.419	2.112.855.172	96,94
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2.962.300	1.459.500	49,27
2.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.750.700	148.745.200	89,20
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.976.100	43.165.000	95,97
2.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	121.774.600	105.580.200	86,70
2.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.655.700	374.873.649	87,05
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.181.500	8.057.500	98,48
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.092.400	26.820.100	99,00
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.857.200	9.821.000	99,63
2.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.674.600	36.582.750	99,75

2.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.496.000	19.276.050	89,67
2.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.320.000	80,00
2.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.954.000	269.996.249	83,86
2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.117.563	538.060.063	96,23
2.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.292.063	37.272.003	90,26
2.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.825.500	500.788.060	96,71
2.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.607.400	163.599.137	65,02
2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.283.400	129.263.637	60,32
2.6.2	Pemeliharaan Mebel	6.918.000	6.050.000	87,45
2.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.406.000	28.285.500	93,03
2.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	Tidak menjadi prioritas karena pindah Gedung kantor
JUMLAH		4.582.028.306	4.208.583.280	91,85

1. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Alokasi anggaran belanja per sasaran pembangunan yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2024 dapat digambarkan melalui Tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Pembangunan Tahun 2024

No	Sasaran		Anggaran	
	Uraian	Indikator	Rp	%
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	980.761.824	21,40
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3.601.266.482	78,60
TOTAL			4.582.028.306	100

Total alokasi anggaran untuk kedua sasaran pembangunan adalah Rp **4.582.028.306** dengan rincian untuk sasaran pembangunan pertama : Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana dengan anggaran **Rp 980.761.824 atau 21,40%**. Sasaran kedua: Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp 3.601.266.482 atau 78,60%**.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Adapun pencapaian kinerja dan anggaran belanja yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2024 dapat disimak pada Tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan : Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	0,60	0,47	78,33			

Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	0,57	0,47	82,46%	980.761.824	860.799.559	87,77%
Program : Program penanggulangan bencana	1. Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	93%	92,86 %	99,85%	980.761.824	860.799.559	87,77%
	2. Jumlah kelurahan Tangguh bencana kategori madya	2 kelurahan	2 kelurahan	100 %			
	3. Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	60 %	60 %	100 %			
	4. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	100 %	100 %			
Sasaran 2: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A(83,70)	A(84,80)	101,31	3.601.266.482	3.347.783.721	92,96

Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan masyarakat	Baik (84,08)	Baik (85,75)	101,99	3.601.266.482	3.347.783.721	92,96
--	----------------------------	--------------	--------------	--------	---------------	---------------	-------

Pada Program Penanggulangan bencana persentase realisasi anggaran Sebesar 87,77% sedangkan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah realisasi anggaran Sebesar 92,96%

3.Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4/5
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	82,46	87,77	0,94
2	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,31	92,96	1,09

Faktor Penghambat tidak terpenuhinya efisiensi pada indeks kapasitas daerah yaitu :

1. Belum adanya kebijakan /regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD)
3. Sulitnya mengimplementasikan kebijakan baru

Tindak Lanjut :

1. Pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pembahasan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di DPRD namun belum ditetapkan, sehingga perlu dikoordinasikan lebih lanjut pada tahun 2025 ke Bagian Hukum

- 2 a. Melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama OPD terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD Tahun 2025
- b. Menyelenggarakan FGD agar secara simultan dan berkelanjutan meminta stakeholder menyisir Kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk ditingkatkan kinerja output masing-masing variabel dari setiap indikator
- 3 Sosialisasi implementasi kebijakan baru kepada calon peserta sosialisasi

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2024, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mempunyai tingkat efisiensi 1,09. Adapun Faktor Pendorongnya yaitu : Komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP.

C. Prestasi / Penghargaan

Beberapa penghargaan /apresiasi yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 antara lain :

- Partisipasi dan dukungan pada Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di SMP Negeri 9 Kota Blitar
- Partisipasi dalam mensukseskan acara Musyda ke-4 dan Jambore Daerah ke-2 Kwarda HW Kota Blitar
- Sebagai Mitra Aksi Resik Kali Blitar-City dalam rangka memperingati Milad LMI ke-29 dan World Clean Up Day 2024- Aksi Berdaya Alam Negeri LM
- Apresiasi kepada BPBD Kota Blitar atas dukungan dalam Penyelenggaraan Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit (P2P) Kota Blitar Tahun 2024
- Apresiasi atas Workshop dan Kunjungan Lapangan terkait Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana.



BAB IV



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun anggaran 2024 yang didasarkan pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *good governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan kinerja. Sebagaimana

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai adanya kendala/hambatan di dalam pelaksanaannya, Namun, di dalam pelaksanaannya pada masa mendatang dirasa akan dapat ditingkatkan dan diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik.

Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian dua indikator kinerja utama /sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana

Target : 0,57 Realisasi : 0,47 Capaian kinerja : 82,46

Untuk mencapai target Indeks yang telah ditentukan, diperlukan adanya kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta Kerjasama dengan OPD terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD.

Sasaran 2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Target Nilai SAKIP perangkat Daerah A(83,70) Realisasi :

A(84,80). Capaian Kinerja : 101,31

Guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah.

B. Langkah Perbaikan

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
- b. Komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1.	Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul	1. Pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan pembahasan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di DPRD namun	-Program penanggulangan Bencana -Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana -Sub Kegiatan	√	√	

	semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat	belum ditetapkan, sehingga perlu dikoordinasikan lebih lanjut pada tahun 2025 ke Bagian Hukum 2. Melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama OPD terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD Tahun 2025 3. Menyelenggarakan FGD agar secara simultan dan berkelanjutan meminta stakeholder menyisir Kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk ditingkatkan kinerja output	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			
--	---	---	---	--	--	--

		masing-masing variabel dari setiap indikator				
2.	Komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP terutama membudayakan monev kinerja berjenjang	1. Mereviu kembali dokumen perencanaan 2. Melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta memanfaatkan hasil	-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah -Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	√	√	
				√	√	

		monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja 3. Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
--	--	--	--	--	--	--

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sepanjang tahun anggaran 2024.

Blitar, Februari 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar





bpbd.blitar kota.go.id



bpbd_kotablitar



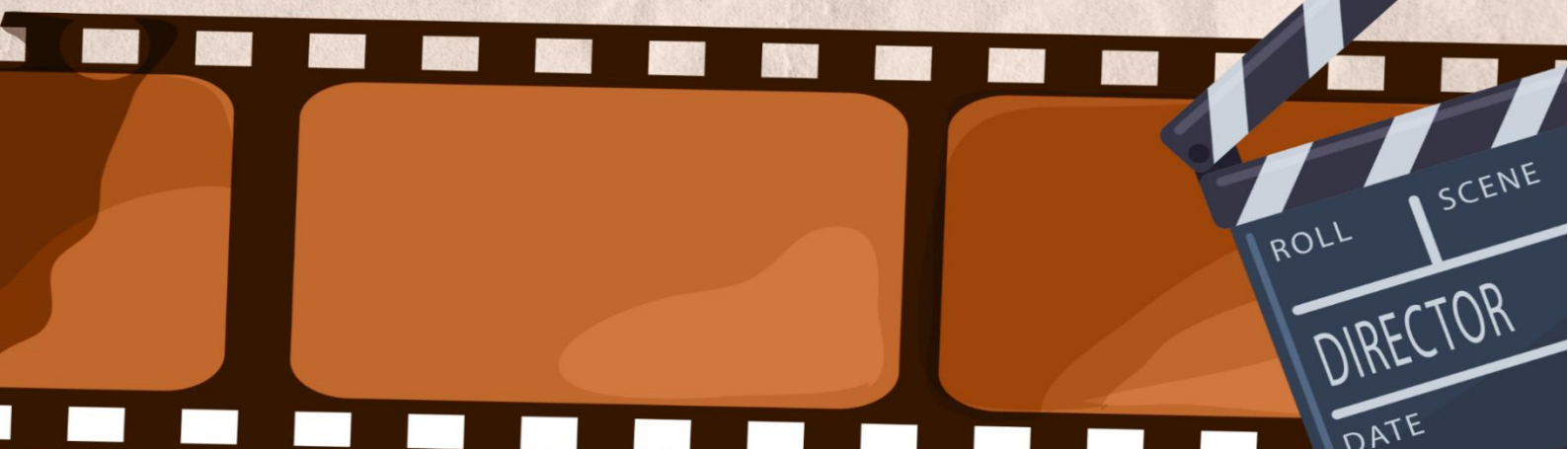
Pusdalops pb Blikot

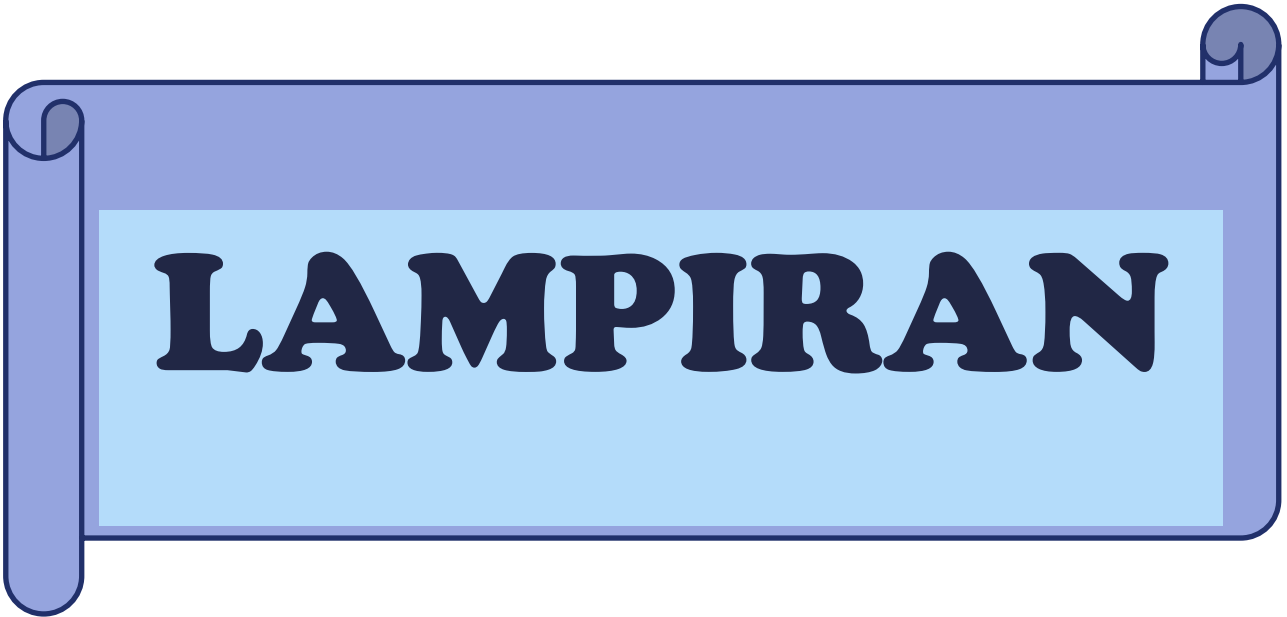


bpbd_kotablitar



08113784157 / 08113184157





LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2021 – 2026

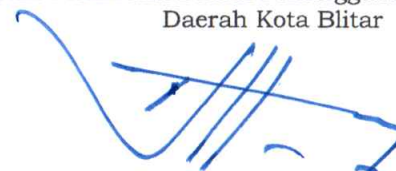
VISI : Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat

MISI : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2024				2020	2024			
Tujuan Misi ke-4 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	0,49	0,60	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	0,49	0,57	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana 2. Peningkatan kelurahan Tangguh bencana 3. Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana 4. Optimalisasi koordinasi penanganan bencana 5. Pemenuhan prasyarat ketahanan daerah	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A	A (83,70)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A	A (83,70)	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah. 1. Mereviu kembali dokumen perencanaan 2. Melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja untuk mendukung capaian kinerja yang	

										diharapkan 3. Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Blitar, Januari 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar



AGUS SUHERLI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680808 199703 1 006

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

TUJUAN : Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana

INDIKATOR : Indeks Ketahanan Daerah

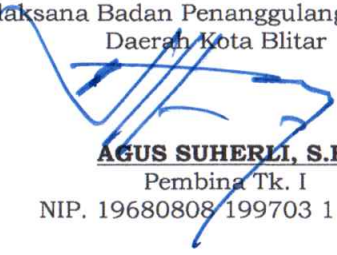
SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	0,57	Program penanggulangan bencana	1.Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	93 %	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (per jenis ancaman bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kabupaten / kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	950 orang	280.451.000
					2. Jumlah kelurahan Tangguh bencana kategori madya	2 kel							
					3.Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penengangan bencana	60 %							
					4. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %							
							Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten / kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	8 kawasan	60.858.800
										Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian Operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	171.695.384

										Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21 kawasan	98.221.800			
										Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	27 orang	138.076.340			
										Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 orang	82.108.400
										Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang telah tersusun	100 %	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 dokumen	149.350.100
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83, 70)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (84, 08)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	6.188.000			
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 laporan	4.463.400			

							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bln	2.179.521.419
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	5 laporan	2.962.300
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	44.976.100
										Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	25 orang	121.774.600
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	8.181.500
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	27.092.400
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	9.857.200
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	36.674.600
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	21.496.000

									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	5.400.000
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	321.954.000
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	100 %		
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	41.292.063
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	517.825.500
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %		
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	214.283.400
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	18 unit	6.918.000
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37 unit	30.406.000
									Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0

Blitar, Januari 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar



AGUS SUHERLI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680808 199703 1 006

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	0,57	0,47	82,46	1. Belum adanya kebijakan /regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana 2. Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Program Penanggulangan Bencana	980.761.824	860.799.559	87,77	Sulitnya mengimple mentasikan kebijakan baru
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A (83,70)	A (84,80)	101,31		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	3.601.266.482	3.347.783.721	92,96	

Blitar, Januari 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar


AGUS SUHERLI, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680808 199703 1 006

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

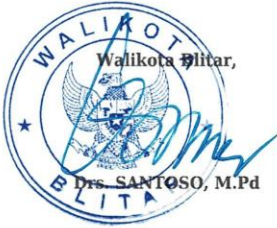
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS SUHERLI, S.H.**
Jabatan : **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd

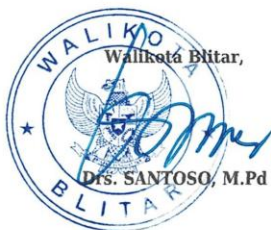
Blitar, 23 September 2024
**Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar,**

AGUS SUHERLI, S.H.
NIP. 196808081997031006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0.57(Indeks)
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	83.70(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	980,761,824.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,601,266,482.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total:		4,582,028,306.00	



Blitar, 23 September 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar,





PEMERINTAH KOTA BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 105, Blitar, 66117, Telp. (0342) 801171-801271
<https://setda.blitarkota.go.id>, e-mail : setdaerah@blitarkota.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : 069.5/ 10 /410.030.2/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : YULIANI INDARYANTI, S.Pd.
NIP : 197407112006042017
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar
yang selanjutnya disebut pihak PERTAMA (Peserta Desk LKj IP)
2. Nama : NIKEN NIULANSARI S.AP
NIP : 198210252010012009
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Blitar
yang selanjutnya disebut pihak KEDUA (Petugas Desk LKj IP)

telah melaksanakan desk atas kebenaran data dan informasi yang disajikan pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Blitar, 25 Februari 2025

Pihak Kedua

Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar


NIKEN NIULANSARI S.AP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198210252010012009

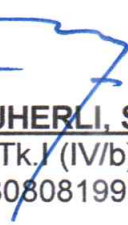
Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Blitar


YULIANI INDARYANTI, S.Pd.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197407112006042017



Mengetahui / Mengesahkan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar


AGUS SUHERLI, SH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196808081997031006

CHECK LIST KELENGKAPAN DESK LKj IP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

NO	DAFTAR OUTLINE LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024	CHECK LIST		KETERANGAN
		Ada	Tidak	
1	Kata Pengantar	✓		
2	Executive Summary	✓		- ditambahkan efisiensi
3	Daftar Isi	✓		
4	BAB I PENDAHULUAN			
	A. Latar Belakang	✓		
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	✓		
	C. Maksud dan Tujuan	✓		
	D. Dasar Hukum	✓		
	E. Aspek-Aspek Strategis (yang menunjang pada tahun berkenaan)	✓		
	F. Isu-isu Strategis (pada tahun berkenaan)	✓		
5	BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA (uraian singkat berupa gambar/tabel/ diagram dan sedikit penjelasan)	✓		
	A. Rencana Strategis 2021 - 2026 (uraian singkat peran PD dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar)	✓		
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	✓		
6	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (uraian singkat berupa gambar/tabel/ diagram dan sedikit penjelasan) minimal menyajikan capaian atas Perjanjian Kinerja pada BAB II	✓		
	A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	✓		
	1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024 (di dalamnya ada unsur pendukung, penghambat dan tindak lanjut perbaikannya)	✓		

NO	DAFTAR OUTLINE LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024	CHECK LIST		KETERANGAN
		Ada	Tidak	
	2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2024 (disertai penjelasan faktor keberhasilan dan / atau penghambat kinerja organisasi periode akhir masa jabatan Walikota, misal mendukung Misi ke berapa dan/atau mendukung Sapta Program Prioritas yang mana)	✓		
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	✓		- ditambah periode 2022 - + narasi yg mendukung misi / sapta Program Prioritas. - ditambahkan meningkatkan monv bisingan.
	4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM), jika tidak ada maka bisa disandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota lain atau capaian Provinsi Jawa Timur	✓		- Perbandingan dihapus cukup 2024 saja. - Tahun pada Target Capaian SPM disesuaikan 2024 / 2025.
	B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	✓		
	1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	✓		
	2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	✓		
	3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	✓		- Ditambahkan narasi Faktor penghambat Mndala
	C. Prestasi/Penghargaan (disamakan dengan data prestasi/penghargaan periode tahun 2024 yang telah disampaikan ke Bappeda)	✓		- Revisi penomoran, ditambah Pembukaan
7	BAB IV PENUTUP (uraian singkat berupa gambar/tabel/diagram dan sedikit penjelasan)			
	A. Kesimpulan (capaian kinerja tahun 2024)	✓		
	B. Langkah Perbaikan (beri penjelasan bahwa langkah perbaikan akan dijadikan dasar perbaikan dokumen perencanaan tahunan maupun menengah PD)	✓		- Langkah perbaikan disesuaikan dengan Bab. 3 hal. 21 - 24.
8	LAMPIRAN - LAMPIRAN			
	A. Rencana Strategis PD Tahun 2021 - 2026 berupa tabel sebagaimana terlampir	✓		- arah kebijakan ditambah dari tabel Bab. 3 hal 21-24 / tanggal Jan 2024.
	B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 berupa tabel sebagaimana terlampir	✓		- tgl Jan 2024.
	C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berupa tabel sebagaimana terlampir	✗	✓	- kurang PK.
	D. Pengukuran Kinerja Tahun 2024 berupa tabel sebagaimana terlampir	✓		- tgl Jan 2025



SIAP UNTUK SELAMAT